

Digital Governance dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Melalui Kearifan Lokal di Kota Bandung

Digital Governance in Realizing Food Security Through Local Wisdom in Bandung City

Nandang Alamsah Deliarnoor¹, Utang Suwaryo², Rina Hermawati³, Agus Taryana⁴

^{1,2,4} Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, Indonesia

³ Departemen Antropologi, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Abstrak

Ketergantungan pangan yang tinggi terhadap daerah lain membuat Kota Bandung sangat rentan terhadap ketahanan pangan, tidak memiliki kedaulatan pangan, rentan terhadap gejolak harga, atau tidak dapat mengontrol harga pangan yang beredar. Tata kelola digital melalui *indigenous knowledge* di Kota Bandung menjadi aspek penting untuk mewujudkan ketahanan pangan, salah satunya melalui pertanian perkotaan terpadu yang disebut Buruan SAE (Pekarangan Sehat Alami dan Ekonomis). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Bandung melalui DKPP belum menerapkan tata kelola pemerintahan digital pada program Buruan Sae, baru baru memulai yaitu dengan pembuatan aplikasi yang belum sempurna yang merupakan layanan menuju pemerintahan digital, belum sampai pada kategori SPBE. Padahal program buruan sae dapat membantu masyarakat memanfaatkan sumber tanaman pekarangan sebagai alternatif untuk ketahanan pangan, dengan adanya teknologi digital yang mendukung program buruan sae DKPP dapat melacak alur barang dari petani hingga ke konsumen, memonitoring kualitas produk, dan memastikan pemenuhan standar keamanan pangan yang memberikan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal.

Kata Kunci: tata kelola digital, kearifan lokal, ketahanan pangan, Buruan Sae

Abstract

Such high food dependence on other areas means that the city of Bandung is very vulnerable to food security, does not have food sovereignty, is vulnerable to price fluctuations, or cannot control the price of food in circulation. Digital governance through indigenous knowledge in the city of Bandung is an important aspect of realizing food security, one of which is through integrated urban farming called Buruan Sae (Natural and Economical Healthy Yard). This research uses a qualitative approach with a case study method in the city of Bandung. The results of the research show that the City of Bandung, through DKPP, has not yet implemented digital governance in the Buruan Sae program, only just starting out, namely with the creation of a rudimentary application that is a service towards digital government, not yet reaching the SPBE category. Even though the sae hunting program can help the community utilize garden plant sources as an alternative for food security, the existence of digital technology that supports the sae hunting DKPP can track the flow of goods from farmers to consumers, monitor product quality, and ensure compliance with food safety standards that provide consumer trust in local products.

Keywords: *digital governance, indigenous knowledge, food security, Buruan Sae.*

How to Cite: Deliarnoor, N. A., Suwaryo, U., Hermawati, R., & Taryana, A. (2024). Digital Governance dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Melalui Kearifan Lokal di Kota Bandung. ***Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*** 9 (2): 115 - 128

*Corresponding author:

ISSN 2460-4585 (Print)

E-mail: nandang.alamsah@unpad.ac.id

ISSN 2460-4593 (Online)

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan isu multidimensi dan sangat kompleks, meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Aspek politik seringkali menjadi faktor dominan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan pangan. Mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan menjadi isu dan agenda prioritas dalam berbagai pertemuan yang diselenggarakan berbagai negara dan lembaga internasional. (Suryana, 2014), sebagai prioritas dalam menjaga ketahanan pangan nasional Pemerintah Indonesia membuat regulasi terkait dengan pangan, yaitu adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dimana pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan ketahanan pangan, bahan baku pangan, bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Upaya mencapai manusia Indonesia yang berkualitas, sangat terkait erat dengan faktor pangan dan gizi, pemenuhan kecukupan pangan dan gizi dapat tercermin dari tingkat pencapaian pangan yang disediakan dan yang dikonsumsi terhadap jumlah pangan dan gizi yang tersedia, mutu maupun keragamannya. (Chaireni et al., 2020),

Indonesia sebagai negara Agraris menjadikan kekuatan bagaimana menjaga ketahanan pangan agar tetap terpenuhi khususnya pangan pokok bagi masyarakat, Pertanian tradisional yang telah berkembang dalam masyarakat selama ini seharusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan sistem tersebut masyarakat petani tradisional

telah berhasil menyediakan makanan bagi satu generasi petani ke generasi berikutnya. Kearifan lokal adalah aspek paling penting dalam sistem pertanian tradisional. Kearifan lokal sering diartikan sebagai pengetahuan setempat (*local knowledge*) yang di dalamnya terkandung pengetahuan serta berbagai strategi dalam menjawab berbagai permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, pemenuhan kebutuhan pangan, serta strategi adaptasi masyarakat dalam menghadapi perubahan lingkungan alam dan sosial. (Sari & Zuber, 2020).

Permasalahan utama dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia untuk sekarang ini terkait dengan tingkat permintaan pangan yang lebih besar dari jumlah persediaan yang ada. Permintaan yang meningkat cepat tersebut merupakan efek dari peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat dan perubahan selera yang ada pada masyarakat. Sementara itu kapasitas produksi pangan nasional pertumbuhannya lambat bahkan stagnan disebabkan oleh adanya kompetisi dalam pemanfaatan sumberdaya lahan dan air, alih fungsi lahan serta stagnannya pertumbuhan produktivitas lahan dan tenaga kerja pertanian. (Agustian et al., 2023).

Kota Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat adalah daerah pemasaran pangan segar terbesar di Jawa Barat. Pangan segar yang didatangkan dari luar wilayah membutuhkan pengawasan keamanan pangan yang lebih intensif untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Kota Bandung. Banyaknya jumlah tempat penjualan pangan segar (61 pasar modern dan 35 pasar tradisional)

menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasannya. Kasus penggunaan bahan kimia berbahaya pada pangan segar masih ditemukan.

Walaupun Kota Bandung masih memiliki lahan pertanian sawah sebesar kurang lebih 640 Ha, tetapi keberadaannya semakin berkurang. Menurut data Bappelitbang (2019), penyusutan sawah di Kota Bandung rata-rata per tahun hampir 100 Ha. Kondisi ini sudah barang tentu menjadi ancaman berkurangnya ruang produksi pangan di Kota Bandung. Apalagi lahan pertanian sawah yang dimiliki oleh Pemkot Bandung yang disebut juga sebagai "sawah abadi" hanya sebesar 22,9 Ha.

Untuk mencapai Ketahanan Pangan bukan hanya masyarakat saja yang berkontribusi melainkan perlu kebijakan dari pemerintah yang mendukung pelaksanaan ketahanan pangan. Pemerintah harus membuat kebijakan dalam menciptakan ketahanan pangan yang juga meningkatkan kedaulatan, keamanan, dan kemandirian pangan. (Kurnia et al., 2020). Kondisi Kota Bandung yang hampir 96,42% suplai pangannya berasal dari luar Kota Bandung, tentunya diperlukan upaya (*effort*) agar masyarakat tetap bertahan dalam ketahanan pangan, salah satunya inovasi Kota Bandung dalam menjaga ketahanan Pangan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) melalui Program Buruan Sae.

Buruan SAE merupakan sebuah program *urban farming* terintegrasi), yang ditujukan untuk menanggulangi ketimpangan permasalahan pangan yang ada di kota Bandung. Melalui pemanfaatan pekarangan atau lahan yang ada dengan berkebun untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga sendiri, cikal bakal program Buruan SAE sudah dimulai sejak

tahun 2014 dengan program *urban farming* namun belum terintegrasi. Pengintegrasian tersebut merujuk pada keterpaduan urban farming dengan berbagai bidang, yaitu peternakan, perikanan, pengolahan hasil, hasil panen, hingga ke pengolahan sampah. Alur pikir konsep program Buruan SAE pertama kali diajukan sebagai Proyek Perubahan PKN II tahun 2020.

Konsep *urban farming* terintegrasi menawarkan solusi dengan menciptakan konsep lahan terbuka hijau di tengah padatnya perkotaan. Mengelola wilayah perkotaan yang tercemar menjadi lingkungan yang nyaman dan sehat untuk ditinggali. Buruan SAE diproyeksikan untuk mencukupi ketersediaan bahan makanan dan memperkuat ketahanan pangan Kota Bandung. Hasil dari Buruan SAE adalah tumbuhnya kemandirian pangan. Artinya kemampuan masyarakat pada unit keluarga memenuhi kebutuhan akan pangan dari hasil budidaya sendiri melalui pemanfaatan pekarangan (buruan) atau lahan yang ada disekitar rumah melalui *urban farming* terpadu (*integrated urban farming*).

Komunitas Buruan SAE yang tergolong ke dalam kelas menengah/pengembangan. Para kelompok pegiat ini tengah dalam proses pengembangan, kelompok pegiat yang semula hanya berkegiatan pada bidang pertanian kini sedang memulai bidang lainnya seperti pada perikanan atau peternakan. Kelompok yang tengah mengalami pengembangan ini juga sudah mulai memasuki tahap penjualan ataupun mulai membagi hasil dari, meskipun tidak bisa rutin.

Buruan SAE (*integrated urban farming*) sebagai Strategi Ketahanan Pangan di Kota Bandung dibuat dalam beberapa tahapan dengan mengusung strategi dalam setiap tahapannya serta dilakukan monitong dan evaluasi dalam setiap kegiatannya. Adapun tahapan pelaksanaan program Buruan SAE adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Tahapan Buruan SAE
Sumber : DKPP Kota Bandung, 2023

Buruan SAE dari DKPP termasuk ke dalam wujud pemberdayaan atau pengembangan masyarakat karena program ini mendorong masyarakat untuk melakukan aksi kolektif untuk mencapai satu tujuan yang sama, yaitu ketahanan pangan pada tingkat keluarga. Namun dengan berbagai latar belakang sosial-budaya dan ekonomi yang ada di masyarakat, implementasi program Buruan SAE pada setiap daerah, dari proses sampai hasilnya, berbeda-beda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, dikarenakan belum adanya sarana terintegrasi yang memudahkan para komunitas untuk mengakses berbagai macam informasi serta layanan pemerintah melalui *digital governance* Buruan Sae yang terintegrasi antara semua stakeholders.

Digital Governance memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan ketahanan pangan di berbagai negara, yang mengacu kepada kemampuan suatu negara untuk dapat memenuhi kebutuhan pangannya. Penggunaan dan pemanfaatan TIK untuk menganalisis kondisi pangan di setiap daerah, membantu masyarakat mengetahui informasi tentang ketahanan pangan, serta membiasakan mengelola distribusi produk makanan dan penampilan pasar. masyarakat lebih mudah mengakses dan mendapatkan informasi yang diberikan oleh pemerintah. (Rohmanudin & Novian, 2022)

Fakta empirik di lapangan masih adanya komunitas Buruan Sae yang keterbatasan Informasi tentang perkembangan Program Buruan Sae dari pihak pemerintah maupun pihak komunitas untuk melakukan sharing terkait dengan tata kelola Buruan Sae (Zubair, 2023), sehingga perlu dilakukan adanya *digital governance* dalam menunjang tata kelola Buruan Sae

Dalam artikel ini yang digunakan adalah istilah *digital governance* bukan *digital government* yang berarti tata Kelola yang menggunakan teknologi digital. Mengapa yang digunakan istilah *digital governance* bukan *digital government* ini akan terlebih dahulu diuraikan dalam pembahasan artikel ini. Perbedaan antara *digital governance* dan *digital government* sebenarnya sudah dikupas tuntas dalam sebuah artikel yang berjudul *Digital Government and Digital Governance : Grand Concept*, termuat dalam International Journal of Scientific and Management (research), yang dikarang oleh Vepkhvia Grigalashvili.

Beberapa Riset yang berkenaan dengan *e-government* memang sudah banyak dikaji seperti *Penerapan Digital Government di Desa Sukajaya Kabupaten*

Sumedang Jawa Barat dimana riset ini mendeskripsikan penerapan digital dalam pelayanan publik di Desa Sukajaya Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di era 4.0. (Afriyani et al., 2021), artikel lainnya yang membahas tentang penerapan *e-government* untuk data kependudukan dengan judul Optimalisasi layanan pengaduan masyarakat pada pemerintah kota binjai menggunakan *e-government* berbasis data kependudukan, penulis mengkaji tentang oprtimalisasi penggunaan *e-government* yang terinterasi dengan data kependudukan dengan perancangan aplikasi, uji coba aplikasi pada lingkup kecil, perumusan optimalisasi dan kajian dari hasil penerapan aplikasi pada masyarakat kota binjai (Muhammad Idaham et al., 2018). Napitulu (2022) judul Sekuritas Pangan di Indonesia : Suatu Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Keamanan Pangan Disertasi ini bicara tentang program sekuritisasi pangan dimana pemerintah melibatkan TNI untuk menjaga stabilitas nasional. TNI dinilai mampu menjaga kebutuhan dan kedaulatan, termasuk ketersediaan, akses, manfaat, dan stabilitas pangan. Dengan menggunakan kerangka konseptual hubungan sipil-militer, kajian ini mencoba menganalisis peran Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI dalam melakukan sekuritisasi keamanan pangan. Namun dalam kajian ini belum menyentuh tentang pentingnya tata Kelola digital dalam menunjang ketahanan pangan.

Perbedaan dengan riset di atas yang menjadi fokus utama atikel ini adalah menyoroti bagaimana suatu kearifan lokal yang dipoles dengan sentuhan teknologi digital dapat lebih cepat termanfaatkan oleh masyarakat sesuai tujuannya. Di Kota

Bandung terdapat konsep buruan sae sebagai sebuah konsep *urban farming terintegrasi*. Tulisan ini akan difokuskan pada hasil penelitian tentang bagaimana korelasi antara *digital governance* dengan buruan sae sebagai salah satu kearifan lokal di Kota Bandung berkontribusi dalam ketahanan pangan di Kota Bandung. Oleh karena itu konsep ketahanan pangan juga merupakan konsep yang harus dijelaskan, karena semua konsep yang dibahas untuk mewujudkan ketahanan pangan. Mengapa kearifan lokal ini harus dimanage dengan menggunakan tata Kelola digital (*digital governance*)? Perubahan terjadi sekarang seperti digambarkan dalam dua gambar di bawah ini tentang faktor determinan perubah masyarakat dan Perubahan masa depan dan dampaknya sedikit banyak akan memberi latar belakang pentingnya pembicaran *digital govenance* dalam mengelola berbagai hal yang menjadi urusan publik termasuk mengelola suatu kearifan lokal.

Akibat globalisasi masif dan komprehensif (*global governace*), Konvergensi teknologi (*digital governance*) dan penciptaan pengetahuan (*knowledge based governace*) maka masyarakat berubah menjadi masyarakat yang akrab dengan teknologi informasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Kota Bandung khususnya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dan analisis

dokumen, kemudian studi kepustakaan terutama yang berkaitan dengan tulisan *digital governance* dan *digital government*, *indigenous knowledge*, ketahanan pangan dan *Buruan Sae*.

Informan ditentukan melalui teknik *purposive*, sedangkan untuk analisis data menggunakan model *Miles and Huberman* dan untuk keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi data. Lokasi penelitian khususnya di Kantor DKPP Kota Bandung dan Komunitas *Buruan Sae*. Informan kunci seperti Kepala DKPP, Kepala Bidang Pangan DKPP, Para Pendamping *Buruan Sae* dan Komunitas *Buruan Sae*. Peneliti juga berkesempatan melihat langsung beberapa *buruan sae* yang ada di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep yang dipakai dalam tulisan ini adalah *digital governance* yang menurut Vepkhvia Grigalashvilli berbeda artinya dengan *digital government* walaupun terkait erat dan hidup berdampingan : *Digital government and digital governance represents two various but closely related and co-existing concepts*. Di bawah ini akan dijelaskan lebih lengkap perbedaan antara *digital government* dan *digital governance*.

1. *Digital Governance* versus *Digital Government*

Vepkhvia Grigalashvilli dalam artikelnya yang berjudul *Digital Government and Digital Governance: Grand Concept* (Grigalashvili, 2023) termuat dalam *International Journal of Scientific and Management (research)*, Volume 6 Issue 02 (February) 2023, ISSN : 2581-6888, page 1-25 menjelaskan perbedaan

antara *digital government* dan *digital governance* sebagai berikut :

Tabel 1. *Digital Governance* versus *Digital Government*

Digital Government	Digital Governance
Artinya pemerintahan digital	Artinya tata kelola digital
Sistem	Fungsi
Disiplin yang lebih sempit yang berhubungan dengan pengembangan layanan <i>online</i> kepada warga (layanan pemerintah)	Konsep yang lebih luas yang mendefinisikan dan menilai dampak teknologi terhadap praktek dan administrasi pemerintahan serta hubungan antara pegawai negeri dan masyarakat luas
Merupakan protokol komunikasi satu arah	Merupakan abstraksi protokol komunikasi dua arah

Sumber: Vepkhvia Grigalashvilli, *Digital Government and Digital Governance: Grand Concept*, *International Journal of Scientific and Management (research)*, Volume 6 Issue 02 (February) 2023, ISSN: 2581-6888, page 1-25, Terjemahan bebas penulis, 2023.

Dengan demikian dalam tulisan ini difokuskan pada konsep *digital governance* dalam arti tata kelola digital dalam mengelola kearifan lokal yang namanya *buruan sae*. Kaitan dengan pemerintahan digital sebenarnya ada yang di Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai Pelaksanaan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Namun seperti disampaikan Kepala Dinas DKPP pada tanggal 30 Agustus 2023 saat penulis mewawancarainya menyatakan bahwa untuk *buruan sae* masih belum masuk SPBE (masih dalam proses) yang sudah masuk SPBE baru E-Wasmut yaitu aplikasi dalam menilai penjaminan mutu di DKPP. Dengan demikian terlihat jelas kaitan erat

pemerintahan digital ini dengan tata Kelola digital.

2. Ketahanan Pangan

Definisi dan paradigma ketahanan pangan terus mengalami perkembangan sejak adanya *Conference of Food and Agriculture* tahun 1943 yang mencanangkan konsep *secure, adequate and suitable supply of food for everyone*". Definisi ketahanan pangan sangat bervariasi, namun umumnya mengacu definisi dari Bank Dunia (1986) dan Maxwell dan Frankenberger (1992) yakni "akses semua orang setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat (*secure access at all times to sufficient food for a healthy life*). Studi pustaka yang dilakukan oleh IFPRI (1999). (Suharyanto, 2011). Selanjutnya ketahanan pangan nasional dapat diartikan sebagai kemandirian dalam penyediaan pangan (Pinstrup-Andersen, 2009). Menurut Life Science Research Organization (LSRO) ketahanan pangan adalah tersedianya akses dimana semua orang di setiap saat mendapatkan makanan yang cukup untuk kehidupan yang aktif dan sehat dan minimal mencakup: a) ketersediaan makanan yang aman dan memadai secara nutrisi, dan b) terjaminnya kemampuan untuk mendapatkan makanan yang dapat diterima secara sosial (sebagai contoh: tanpa menggunakan persediaan makanan darurat, memulung, mencuri, dan strategi mengatasi lainnya). (Yustika Devi et al., 2020)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf a dan c, pangan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, kemudian merujuk dalam

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Pasal 1 menyatakan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman, kemudian, selanjutnya Ketahanan Pangan merujuk Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Pasal 1 poin 4 Ketahanan Pangan didefinisikan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan merujuk kepada adanya ketersediaan dan cadangan pangan serta bagaimana kemampuan individu agar dapat mengelola serta memanfaatkannya. Keluarga memiliki kategori ketahanan pangan jika dapat menanggulangi semua kerentanan pangan seperti kelaparan.

Digital Governance memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat serta real time untuk mendeteksi tentang pasokan pangan masyarakat Kota Bandung, menghasilkan satu data pangan yang terintegrasi dan memudahkan untuk pengambilan keputusan pimpinan. Pemerintah Kota Bandung dapat mudah menyediakan sarana informasi untuk

masyarakat melalui media online seperti harga-harga pangan, bibit, bakalan ternak, serta pemerintah dapat memonitor suply pangan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dengan terintegrasinya data melalui *Digital Governance*

3. Kearifan Lokal Buruan Sae

Istilah kearifan lokal dalam Bahasa Inggris adalah *indigenous knowledge*. Menurut Nurdin & Ng yang dikutip M. F. H. Nasution, B. O. Y. Marpaung, Nurlisa Ginting, H. T. Fachrudin dalam artikel, " *The Influence of Local Knowledge on the Continuity of Vernacular Dwellings in Hampan Perak Sub-District Civil Engineering and Architecture* (Nasution et al., 2023), menyamakan *local knowledge* dengan *local wisdom* yang disebut dengan "indigenous knowledge" yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu dalam berinteraksi dengan alam dan lingkungan. Kearifan lokal atau kearifan lokal bersifat dinamis, akan terus berkembang seiring berjalannya waktu, dan akan terbukti sesuai pemanfaatannya oleh budaya dan lingkungan setempat. Keberadaan kearifan lokal tidak hanya terdapat pada sektor pertanian, kesehatan, dan kuliner saja, namun juga terdapat pada sektor arsitektur khususnya arsitektur vernakular. Kearifan lokal tidak dapat dipisahkan dari budaya lokal masyarakat.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah buruan sae merupakan kearifan lokal? Berdasarkan pengakuan penggagasnya yaitu Kepala Dinas DKPP menyatakan sebagai berikut :

"Ini sebetulnya, kalau Buruan Sae itu kan istilah umumnya *Urban Farming*, ya. Cuma kita ada bahasa integrasinya. Jadi, masyarakat kota berkebun

memanfaatkan pekarangan itu sudah lama sebetulnya (*menjadi warisan dari nenek moyang sebenarnya*), Cuma belum begitu masif dan belum begitu terinternalisasi, begitu. Belum sampai masyarakat seperti sampai sekarang. Nah, makanya yang kita lakukan yang awal kita, dan ini sesuai dengan tupoksi kita sebetulnya, DKPP itu memberikan semacam edukasi, pengetahuan, sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pangan, pertanian secara umum, khususnya Buruan Sae. Jadi kita, secara teknis kita mengunjungi keluarga atau rumah tangga atau komunitas untuk memberikan tadi, bimbingan dan edukasi terkait dengan itu. Nah, setelah itu khusus untuk Buruan Sae, setelah mereka diberi pengetahuan kemudian ada minat untuk melakukan Buruan Sae kita berikan insentif semacam bantuan, apakah itu bibit (terutama bibit). Bibit, media, tadi selain pengetahuan. Setelah mereka mendapat pengetahuan untuk uji coba, untuk mereka melakukan kita berikan insentif bibit, media dan sebagainya, wadah *lah* gitu. Nah, itu yang kita lakukan pembinaan dari mulai pendampingan, *gitu*. Kalau pembinaan sudah. Dari pendampingan bagaimana cara menyiapkan tanah, bagaimana cara menanam, bagaimana nanti cara merawat, bagaimana cara sampai ke panen. Bahkan sampai ke memanfaatkan hasil itu seperti apa, *gitu*. Itu yang kita lakukan, jadi kita kalau di kantor ada tenaga-tenaga penyuluh pertanian, ada juga namanya tenaga pendamping. Kalau untuk Buruan Sae ada pendamping khusus, jadi ditambah tenaganya karena memang ini yang Program Khusus, ya. jadi secara teknis mereka yang ke lapangan melakukan tadi, edukasi dan pendampingan ke khususnya masyarakat Kota Bandung".

Tentang *buruan sae* yang merupakan warisan nenek moyang, peneliti menjadi

teringat akan ceramah Pancasila dari Bung Karno. Zaman dahulu berburu merupakan mata pencaharian yang paling utama sehingga simbol Ketuhanan ada pada binatang yang telah memberikan kehidupan. Di rumah istri-istri para pemburu kata Bung Karno sambil menunggu para suami berburu pulang dengan membawa buruannya kemudian di depan rumah samping atau belakang rumah bercocok tanam. Benar saja suatu saat para suami mereka datang tidak dengan membawa apa-apa, tapi tanaman yang ditanam isteri mereka dapat menyelamatkan mereka dari kelaparan. Perempuan bahkan dianggap dewa penyelamat dari kelaparan dan kematian yang kata Bung Karno di beberapa daerah dijadikan sebagai simbol Ketuhanan. Berdasarkan cerita Bung Karno ini dan dikaitkan dengan buruan sae persis sejajar yang menunjukkan *buruan sae* diangkat dari kehidupan masyarakat dan merupakan kearifan atau budaya lokal.

Berdasarkan pernyataan Kepala Dinas DKPP di atas jelas mengakui bahwa sebenarnya beliau juga menggali suatu kebiasaan yang ada di masyarakat sudah sejak lama bahkan diwariskan nenek moyang konsep buruan sae ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep buruan sae ini merupakan konsep yang diadopsi dari kearifan lokal masyarakat. Apa sebenarnya dan bagaimana konsep buruan sae itu? Pada tanggal 30 Agustus 2023 bertempat di kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung penulis langsung mendapat keterangan dari Kepala Dinas DKPP Ir. Gingin, M.A. dan dihadiri para Kepala Bidang khususnya dalam Bidang Pangan, bahwa kegiatan Buruan sae itu meliputi :

1. Integrasi berbagai jenis pangan;
2. Pemanfaatan hasil yang memiliki nilai ekonomi;
3. Sirkulasi pemanfaatan hasil pangan;
4. Pemberdayaan masyarakat.
5. Kolaborasi berbagai program sampah, Kesehatan,

penanggulangan stunting, rentan pangan.

6. Nilai budaya dikembangkan.

Di Kota Bandung ada 405 Komunitas yang memiliki permasalahan yang sama yaitu soal susahnya mendapatkan bibit. Apa yang dilakukan oleh pendamping dari DKPP terhadap komunitas buruan sae yaitu:

1. Pembinaan;
2. pendampingan: pembentukan kelompok;
3. edukasi;
4. bantuan sarpras;
5. monev; dan
6. pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya hasil panen dicatat dan dilaporkan. Aplikasi *buruan sae* DKPP sempat jalan selama 6 bulan dan hasilnya sangat luar biasa mulai dari laporan dari komunitas yang cepat dolah termasuk bila ada masalah sehingga penanganannya pun oleh pihak DKPP cepat direspon. Ketika aplikasi DKPP ini mengalami kerusakan dan vakum beberapa waktu buruan sae juga turut tidak lancar bahkan beberapa komunitas mandeg.

Namun dari kajian lapangan ditemukan bahwa sampai saat ini belum ada komunitas baik yang dianggap berhasil apalagi yang tidak berhasil menggunakan teknologi digital dalam aktivitasnya. Dari fenomena ini nampak bahwa digital governance masih berupa harapan ke depan. Karena penggunaan teknologi hanya searah dari DKPP bahkan sempat mandeg ini hanya bisa dikategorikan sebagai *digital government* saja.



Gambar 4. web site Buruan Sae

Sumber : <https://buruansae.bandung.go.id/>

Hambatan pengembangan Buruan SAE yang lainnya adalah Dalam melaksanakan program Buruan Sae, DKPP memiliki beberapa hambatan terlebih karena program *Buruan Sae* yang berkaitan dengan pertanian dilaksanakan pada wilayah perkotaan. Masyarakat perkotaan lazimnya kini bukanlah berprofesi sebagai petani, dalam tahapan awal program proses memulai dan pembiasaan bertani/berkebun pada masyarakat menjadi tantangan yang pertama. Selanjutnya, pertanian di perkotaan belum dikelola secara profesional dalam artian pertanian maupun perkebunan di wilayah perkotaan bukan kegiatan utama khususnya dalam konteks mata pencaharian, maka kegiatan pertanian atau perkebunan ini kemungkinan besar mesti dilaksanakan di waktu luang selepas pekerjaan utama selesai (pada usia produktif), kemudian juga adanya Fenomena kegagalan pasar terjadi pada dimensi urban farming melalui Ketidaknyamanan masyarakat terhadap produk yang beredar di pasar merupakan salah satu motif dominan munculnya urban

farming bottom up oleh organisasi independen. (Gede et al., 2023)

Masyarakat perkotaan yang cenderung hidup soliter dengan rutinitas dan kesibukannya memerlukan tahapan pembangunan modal sosial untuk dapat kompak, karena program Buruan SAE ini merupakan program untuk komunitas. Kebiasaan masyarakat perkotaan sebagai konsumen juga menjadi hambatan untuk menumbuhkan semangat dan keinginan untuk dapat mewujudkan kemandirian pangan. Ketersediaan lahan untuk kegiatan Buruan SAE juga menjadi tantangan selanjutnya. Berbagai perbedaan jenis pola perumahan di wilayah perkotaan mengharuskan pelaksana program berupaya untuk dapat menyesuaikan penempatan Buruan SAE. Pada wilayah dengan pola perumahan padat, lahan kosong bahkan pekarang rumah sendiri sangat terbatas keberadaannya. Pada pola perumahan lainnya juga pemanfaatan lahan pekarangan rumah dan kawasan tidur di wilayah perkotaan belum optimal, hal tersebut berkaitan dengan kesibukan masyarakat perkotaan dan perlunya peningkatan minat masyarakat perkotaan terhadap kegiatan pertanian.

Berdasarkan hasil kajian dari beberapa komunitas dari buruan sae ada juga yang tidak berhasil dikarenakan faktor lahan serta aspek individualistis dari masyarakat perkotaan seperti Buruan SAE Garda Putri Satu berada di Jl. Olah Raga I, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung. Saluran dalam menyampaikan berbagai kebutuhan untuk sebetulnya sudah dapat disampaikan melalui aplikasi yang ada dalam web site www.buruansae.bandung.go.id yang disediakan oleh DKPP sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai Program Buruan Sae, namun seiring dengan para anggota komunitas yang sulit berbagi informasi dan minimnya fasilitasi untuk sarana prasarana untuk mengakses aplikasi tersebut.

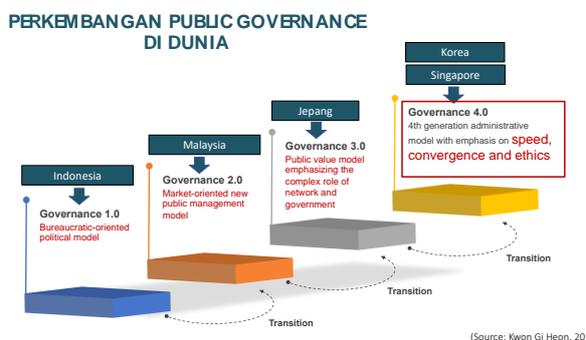
Perlunya teknologi digital dalam pelayanan publik dan sistem informasi

nasional mutlak dalam meningkatkan peran para komunitas Buruan Sae agar berhasil, namun kenyataan adalah kurangnya budaya berbagi informasi, terbatasnya akses informasi, dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di bidang Teknologi Informasi, menjadi kendala dalam proses transformasi kearah digital. (Farida et al., 2020)

4. *Digital Governance* dan *Indigenous Knowledge* Penyumbang Kemakmuran Bangsa

Berdasarkan uraian di atas Nampak jelas kebutuhan tata Kelola digital di masa kekinian merupakan keniscayaan atau *conditio sine quanon*. Keberhasilan dari Buruan Sae dalam digital governance adalah membangun aplikasi pengendalian, monitoring dan evaluasi berupa pembangunan website buruan sae www.buruansae.bandung.go.id, dimana fitur-fitur dalam apliaksi ini dapat mewedahi semua bentuk kegiatan dalam ketahanan pangan melalui urban farming.

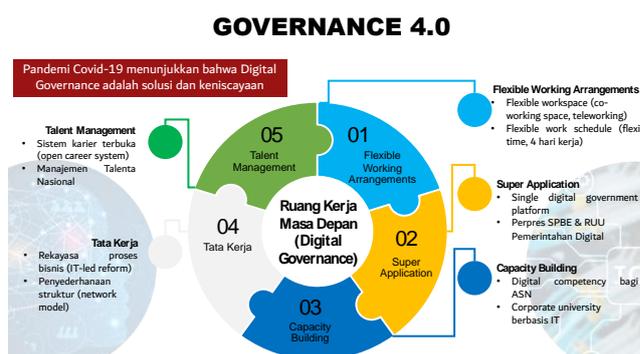
Benarkah *Digital Governance* dan *Indigenous Knowledge* akan menjadi penyumbang kemakmuran dan kemajuan suatu bangsa? Referensi kita adalah Korea Selatan yang oleh Kwon Gi Heon, 2020 di tempatkan menempati urutan pertama dunia dalam hal tata Kelola publik dengan sebutan *Governance 4.0* bersama dengan singapura. Perhatikan Gambar di bawah ini:



Gambar 7. Perkembangan *Public Governance* di Dunia, Sumber : Kwon Gi Heon, 2020 dalam Eko Prasoj dkk, 2021

Kita jangan melupakan bahwa berhasilnya pembangunan Korea Selatan

menjadi negara maju seperti sekarang ini tidak bisa dipisahkan dengan kearifan lokal *saemaul undong*. Tentu saja mudah menerka akan sangat berkaitan antara implementasi *saemaul undong* sebagai kearifan lokal ini dengan *digital governance*. Apalagi bila kita melihat arsitektur *governance 4.0* yang dikemukakan Kwon Gi Heon, 2020 yang menggambarkan tata Kelola publik yang dilakukan oleh Korena Selatan dan Singapura.



Gambar 9. *Governance 4.0*
Sumber : Eko Prasoj dkk, 2021

Berdasarkan gambar di atas ke depan diharapkan seluruh *stakeholder* yang berkaitan dengan program buruan sae mulai dari pihak pemerintah dalam hal ini DKPP dan dinas terkait lainnya, pihak masyarakat termasuk komunitas buruan sae, para pengusaha, pers bahkan Para akademisi di perguruan tinggi masuk dalam ruang kerja masa depan (*digital governance*) seperti yang digambarkan di atas.

Saat pandemic covid-19 menunjukkan bahwa *Digital Governance* menjadi solusi dan keniscayaan sebab setiap orang waktu itu dibatasi ruang geraknya secara fisik, maka berbagai kegiatan dan program dilakukan lewat daring atau on line. Ini adalah budaya baru yang sebelum pandemik tidak pernah terbayangkan

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik beberapa simpulan. Ada korelasi positif antara *digital governance* dengan kearifan lokal (*buruan sae*), walaupun masih jauh panggang dari api bahkan baru bisa dikategorikan sebagai perintisan *digital government* untuk perkembangan pengelolaan *buruan sae* saat ini. Perwujudan *digital governance* dalam mengangkat kearifan lokal harus memperlihatkan dampak teknologi terhadap praktek dan administrasi pemerintahan serta hubungan antara pegawai negeri dan masyarakat luas. Namun *best practice* dunia menunjukkan hal yang memngembirakan seperti terangkatnya saemaul undong di Korea yang tegak lurus dengan meningkatnya perkembangan *e-government* di Korea Selatan sehingga menempatkan Korea Selatan di *Governance 4.0*. Perlu penggalan kearifan lokal baru selain *buruan sae* di Kota Bandung terutama untuk memperkuat ketahanan pangan kota Bandung.

Beberapa saran yang ditujukan kepada DKPP. Penambahan anggaran yang berkaitan dengan prasara teknologi digital minimal untuk melaksanakan Program SPBE pada tataran *e-government*, Percepatan perbaikan aplikasi *buruan sae* untuk memaksimalkan pelayanan DKPP dan memberikan stimulant pada komunitas *buruan sae* untuk mulai menggunakan IT dalam berbagai kegiatan. Hal ini untuk menciptakan tata Kelola yang menyeluruh dengan menggunakan Teknologi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Sanusi, Fadilah Putra, *Governansi Nusantara, Jejak Kosmopolitanisme dalam Sejarah Kepemerintahan di Indonesia*, LP3ES, 2019.
- Afriyani, A., Wahidah, I., & Wibowo, M. T. H. (2021). Penerapan Digital Government di Desa Sukajaya Kabupaten Sumedang Jawa Barat. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 3(2), 147-158. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v3i2.13572>
- Agustian, D., Patiung, M., Rembu, Y., Nur, M., & Ode, S. (2023). Network Governance Dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 63. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i1.8225>
- Chaireni, R., Agustanto, D., Wahyu, R. A., & Nainggolan, P. (2020). Ketahanan Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 1(2), 70-79. <http://jkpl.ppi.unp.ac.id/index.php/JKPL/article/view/13>
- Eko Prasajo dan Tim Ahli PPUU DPD RI, Naskah Akademik dan Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 17 Juni 2021.
- Farida, I., Setiawan, R., Maryatmi, A. S., & Juwita, N. M. (2020). The Implementation of E-Government in the Industrial Revolution Era 4.0 in Indonesia. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 22(2), 340-346. <http://ijpsat.ijsht-journals.org>
- Gede, I. D., Sedana, P., Luh, N., & Ening, P. (2023). *Urban Farming dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Perkotaan*. 1(3).
- Grigalashvili, V. (2023). Digital Government and Digital Governance: Grand Concept. *International Journal of Scientific and Management Research*, 06(01), 01-25. <https://doi.org/10.37502/ijsmr.2023.6201>
- Heri Napitupulu (2022). *Sekuritas Pangan di Indonesia Suatu Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Keamanan Pangan*. Universitas Padjadjaran
- Kurnia, A. W., Sundari, S., & Purwanto, D. A. (2020). Implementasi Kebijakan Cadangan Pangan Nasional Dalam Kondisi Darurat Di Badan Ketahanan Pangan Guna Mendukung Pertahanan Negara. *Manajemen Pertahanan*, 6(1), 73-99.
- Muhammad Idaham, Pranoto, H., & Ahmad Ilham. (2018). Optimalisasi Layanan Pengaduan Masyarakat pada Pemerintah Kota Binjai Menggunakan eGovernment berbasis Data Kependudukan. *Jurnal Sistem Cerdas*, 1(1), 19-32. <https://doi.org/10.37396/jsc.v1i1.3>
- Nasution, M. F. H., Marpaung, B. O. Y., Ginting, N., & Fachrudin, H. T. (2023). The Influence of Local Knowledge on the Continuity of Vernacular Dwellings in Hamparan Perak Sub-District. *Civil Engineering and Architecture*, 11(5), 2687-2705. <https://doi.org/10.13189/cea.2023.110533>
- Rohmanudin, A. O., & Novian, R. (2022). Analisis

Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah Di Kabupaten Sumedang. ... - *Journal of Regional Public ...*, 7, 48-59. <https://ejournal.unsap.ac.id/index.php/jrpa/article/view/599%0Ahttps://ejournal.unsap.ac.id/index.php/jrpa/article/download/599/248>

Sari, I. P., & Zuber, A. (2020). Kearifan Lokal Dalam Membangun Ketahanan Pangan Petani. *Journal of Development and Social Change*, 3(2), 25. <https://doi.org/10.20961/jodasc.v3i2.45768>

Sheldon S. Steinberg dan David T. Austern, *Government, Ethics, and Managers, Penyelewengan Aparat Pemerintahan*, Remaja Rosdakarya, 1999.

Suharyanto, H. (2011). KETAHANAN PANGAN Heri Suharyanto. *Sosial Humaniora*, 4(2), 186-194. <http://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/633/355>

Suryana, A. (2014). Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 32(2), 123. <https://doi.org/10.21082/fae.v32n2.2014.123-135>

Yustika Devi, L., Andari, Y., Wihastuti, L., & Haribowo, K. (2020). Model Sosial-Ekonomi Dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 28(2), 103-115. <https://doi.org/10.14203/jep.28.2.2020.103-115>

Zubair, F. (2023). Pelatihan Media Literasi Digital Bagi Pengelola “Buruan Sae” Di Kelurahan Palasari Bandung. *Jurnal Kajian Budaya Dan Humaniora*, 5(1), 25-32. <https://doi.org/10.61296/jkbh.v5i1.87>

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)